

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Masalah ketimpangan pendapatan terus menjadi pembahasan setiap negara di belahan bumi, negara berkembang khususnya seperti Indonesia. Awal kemunculan masalah kemiskinan adalah tidak meratanya distribusi pendapatan yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Apabila kedua masalah ini dibiarkan berlarut – larut maka akan semakin memperparah keadaan, dan dapat timbulnya konsekuensi negative terhadap kondisi sosial serta politik. Seperti dinyatakan dalam (Chrisamba, 2015) bahwa kegagalan pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh buruk terhadap bidang perekonomian saja, tetapi juga sosial, politik dan keamanan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tumbuhnya kecemburuan soial dan kemiskinan yang nantinya dapat berujung pada resiko terbesar seperti kerusuhan dan gerakan separatis.

Munculnya permasalahan kesenjangan pendapatan merupakan dampak dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang merata di suatu daerah sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan yang tinggi antar golongan masyarakat. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pembangunan yang terjadi masih belum berkualitas dikarenakan belum semua golongan merasakan pembangunan yang dilakukan. Seperti yang dikatakan (Sukirno, 2007) yaitu pembangunan dapat dikatakan berkualitas apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mendorong distribusi pendapatan yang semakin merata dan tingkat kemiskinan semakin rendah.

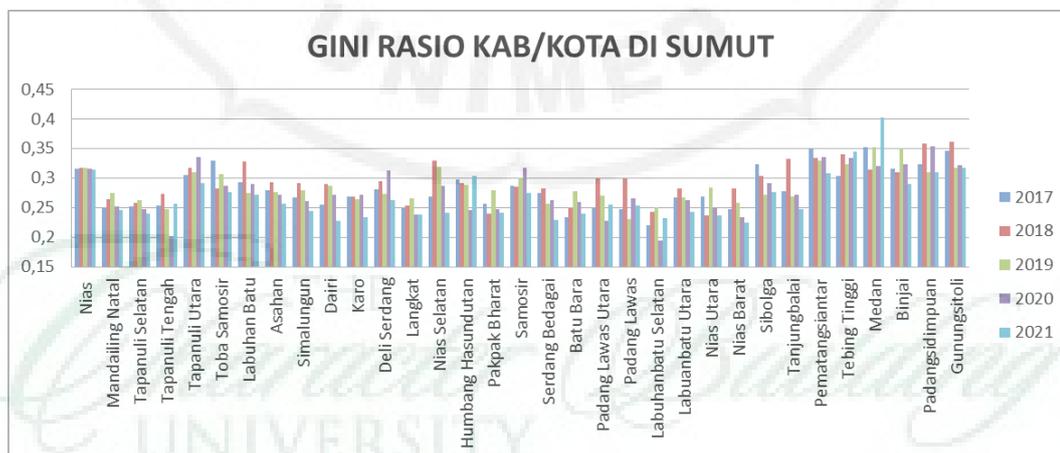
Hal yang penting untuk dipantau ialah aspek pemerataan distribusi pendapatan, sebab jika pendapatan di suatu daerah sudah merata maka kesejahteraan pada daerah tersebut juga pasti akan tercapai. Oleh karena itu, masalah ini harus diantisipasi atau paling tidak bisa mengurungnya. Masalah ketimpangan pendapatan memang adalah masalah yang kompleks dan sifatnya multidimensional. Untuk itu, harus dilakukan langkah penyelesaian akan masalah, dimana upaya penyelesaiannya, harus dilakukan secara komprehensif yang mana artinya adalah beragam hal dalam kehidupan semua lapisan publik dalam suatu negara harus dicakup, serta melaksanakannya harus secara terintegrasi. Hal ini berarti pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan penyebab permasalahan yang berbeda. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka masalah ketimpangan distribusi pendapatan ini tentu akan dapat diselesaikan.

Instrument untuk mengukur melihat tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ialah koefisien gini (*gini ratio*). Nilai koefisien gini yaitu antara 0 sampai dengan 1. Apabila suatu daerah semakin mendekati mendekati 0 berarti bahwa distribusi pendapatan di daerah tersebut semakin merata. Dan sebaliknya, Ketika angka koefisien gini suatu daerah mendekati 1 berarti bahwa distribusi pendapatan di daerah tersebut semakin timpang.

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 33 kabupaten/kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pemerataan distribusi pendapatan. Berikut data gini rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara :

**Gambar 1.1**

**Grafik Gini Rasio Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2017 – 2021**



Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas, gini rasio setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Daerah yang memiliki gini rasio tertinggi di provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2017 – 2021 adalah kota

Medan, kabupaten Gunungsitoli, kabupaten Padang Sidempuan, dan kota Binjai. Dimana di tahun 2021 gini rasio kota Medan mencapai 0.402, kabupaten kabupaten gunung sitoli juga mencapai 0.361 di tahun 2018. Begitu juga dengan kabupaten Padang Sidempuan pernah mencapai 0.359 pada tahun 2018 dan kota binjai mencapai 0.351 pada tahun 2019. Namun untuk daerah yang memiliki gini rasio terendah di Provinsi Sumatera Utara adalah kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara dan Serdang Berdagai.

Menurut (Tiara, 2009) ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

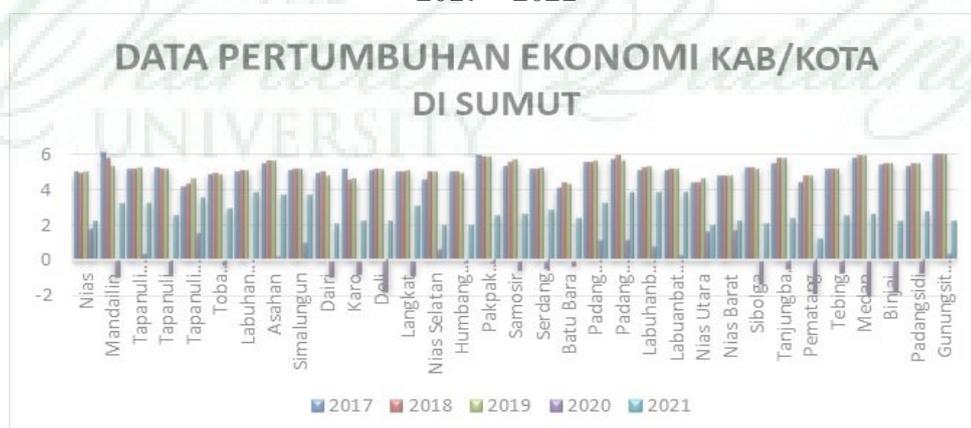
Kesenjangan pendapatan tentu akan dipengaruhi oleh faktor – faktor yang berbeda di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki setiap wilayah maupun individu untuk membangun daerahnya berbeda – beda dan sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya alam buatan (modal dan infrastruktur), sumber daya sosial yang meliputi ekonomi, budaya, adat istiadat, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana yang tersedia serta faktor – faktor lain yang mempengaruhi perkembangan pembangunan dan mengakibatkan pertumbuhan dan kesejahteraan

ekonomi yang dicapai masyarakat di setiap daerah berbeda dan itu jugalah yang menyebabkan ketimpangan dari setiap daerahnya berbeda dengan daerah lainnya.

Faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan di dalam suatu daerah paling dominan adalah meningkatkannya pertumbuhan ekonomi (Todaro, Michael P & Smith, 2011 : 283). Apabila pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan pemerataan pembangunan maka daerah yang terbelakang mengalami kemiskinan. Faktor inilah yang selanjutnya akan menyebabkan ketimpangan di suatu daerah.

Menurut (Sukirno, 2016) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi menjadi masalah makro ekonomi jangka Panjang dikarenakan dari satu period ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur atau menerangkan prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Berikut grafik yang menunjukkan data Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 – 2021.

**Gambar 1.2**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2017 – 2021**



Sumber : BPS Sumut (data diolah)

Pada gambar 1.2 menunjukkan laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mengalami Fluktuasi dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah dari Kabupaten Mandailing Natal dimana pada tahun 2017 mencapai 6.09%. Kemudian Kota Medan dimana pada tahun 2019 mencapai 5.93%. Namun Kota Medan juga tercatat memiliki laju Pertumbuhan Ekonomi yang terendah di Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2020 mencapai -1.98% kemudian Kabupaten Batu Bara pada tahun 2017 Laju Pertumbuhannya mencapai 4.11%.

Pada tahun 2020 secara keseluruhan Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini disebabkan akibat pandemic Covid-19 yang membuat banyak sektor – sektor ekonomi yang harus berhenti sejenak bahkan ada yang sampai harus gulung tikar. Oleh karena itu pada tahun 2020 keadaan perekonomian memang hancur itulah mengapa pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Sumatera Utara turun drastis bahkan ada yang minus. Namun pada tahun 2021 sudah mulai pulih dan meningkat dari tahun 2020 karena sektor – sektor yang sebelumnya harus pasif sudah dapat berjalan aktif kembali.

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan mulai mengemuka Ketika Simon Kuznets mengemukakan hipotesis U terbalik. Kuznets menyatakan bahwa Ketika pertumbuhan ekonomi di mulai maka distribusi pendapatan cenderung memburuk, setelah mencapai tingkat tertentu distribusi pendapatan semakin merata. Hipotesis Kuznets dapat di buktikan dengan pembuatan grafik antara pertumbuhan PDB dan Indeks ketimpangan. Seolah – seolah dalam jangka pendek ada korelasi yang positif

antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, artinya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan ketimpangan pendapatan (Todaro, Michael P & Smith, 2011: 277).

Selain faktor jumlah penduduk faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah IPM. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas masyarakat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut BPS IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

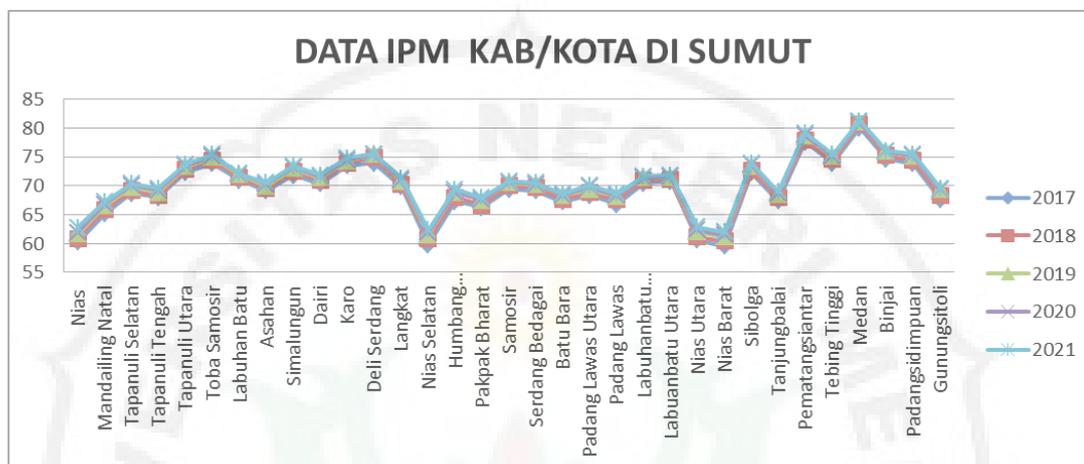
Dimensi umur panjang dan hidup sehat memiliki indikator yaitu angka harapan hidup saat lahir. Jika angka harapan hidup saat lahir tinggi tentu akan banyak orang – orang yang diharapkan nantinya dapat menjadi penerus dan juga faktor produksi baru untuk tahun – tahun selanjutnya. Dan juga akan ada manusia baru yang nantinya akan dibentuk dan didorong untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena penambahan jumlah penduduk tanpa dibarengi kualitas sumber daya yang bagus malah akan menimbulkan masalah seperti pengangguran, meningkatkan angka kemiskinan bahkan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Dimensi yang selanjutnya adalah dimensi pengetahuan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Dimensi pengetahuan tentu dilihat dari tingkat pendidikannya. Hal tersebut sesuai dengan teori *human capital*, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Dimensi yang selanjutnya adalah pengeluaran dengan indikator pengeluaran per kapita. Dengan melihat indikator ini maka dapat dilihat apabila pengeluaran per kapita itu tinggi maka tentu pendapatan per kapita juga bisa dikatakan tinggi dan begitu sebaliknya jika pengeluaran perkapitanya rendah maka tentu pendapatan perkapitanya rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengeluaran perkapita menunjukkan bahwa tingkat perekonomian di suatu daerah tersebut baik dan begitu sebaliknya. Dan apabila tingkat perekonomian di suatu daerah itu sudah baik maka tentu ketimpangan pendapatannya pasti rendah karena kemampuan membeli barang ataupun jasa di daerah tersebut sudah secara merata dan begitu sebaliknya.

IPM di setiap daerah tentu berbeda – beda tergantung dengan bagaimana daerah itu meningkatkan IPM atau sumber daya manusia yang dimiliki di daerah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan di setiap daerah itu berbeda juga. Begitu juga dengan Provinsi Sumatera Utara IPM di tiap kabupaten/kota di Sumatera Utara berbeda – beda namun secara keseluruhan IPM di kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut grafik yang menunjukkan data IPM di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 – 2021 :

**Gambar 1.3**  
**Grafik IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2017 – 2021**



Sumber : BPS Sumut (data diolah)

Dari grafik di atas, diperoleh bahwa tingkat IPM di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mengalami Fluktuasi. Namun untuk daerah yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Medan dengan IPM sebesar 81.21 di tahun 2021. Dan untuk yang terendah adalah Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 59,56 pada tahun 2018. Berdasarkan buku BPS 2015 IPM berada di  $< 60$  yang berarti di daerah tersebut memiliki tingkat IPM yang rendah. Hal itu berarti tingkat IPM di Kabupaten Nias Barat tergolong IPM yang rendah.

Ketidakmerataan tingkat IPM menyebabkan perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang ada di setiap daerah, ada daerah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik ada pula daerah yang SDM nya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, IPM memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana semakin tinggi IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduk sehingga tingkat pendapatan akan semakin tinggi, sebaliknya jika IPM rendah maka produktivitas akan rendah dan akan berpengaruh

pada pendapatan. Seperti yang dikemukakan oleh Becker (dalam Suryani & Woyanti, 2021) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Hubungan yang sama juga dijelaskan (Arafah & Khoirudin, 2022) dalam penelitiannya yaitu IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Perbedaan ketimpangan di setiap daerah tentu tergantung pada kebijakan pemerintah yang ada di daerah tersebut bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerahnya.

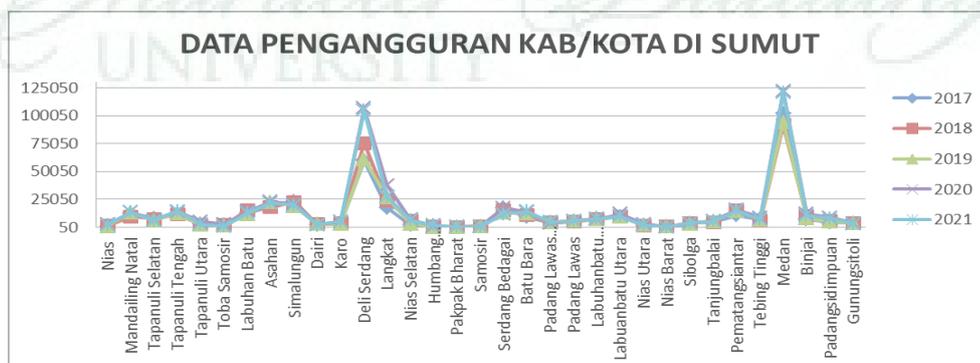
Namun jika dilihat dari data IPM dan Gini Rasio Sumatera Utara berbeda dengan teori Becker dimana IPM di Sumatera Utara meningkat dan ketimpangannya juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dimana dikatakan bahwa rata - rata lama sekolah di Sumatera Utara relatif tinggi, namun pertumbuhan itu hanya ada di daerah pusat perekonomian khususnya di daerah perkotaan yang ketersediaan fasilitas Pendidikan sudah lebih maju dibandingkan dengan daerah pedesaan sehingga memicu disparitas ekonomi. Keterbatasan akses sarana/prasarana Pendidikan di pedesaan menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat menikmati Pendidikan, terlebih lagi bagi penduduk yang kurang mampu, ada beberapa hal yang tentunya mempengaruhi kesenjangan Pendidikan di pedesaan dengan perkotaan yaitu sulitnya akses menuju sekolah, kualitas sarana dan prasarana sekolah di pedesaan yang belum memadai dan jumlah guru tenaga pengajar yang belum memadai. Todaro & Smith menjelaskan bahwa ketidakmerataan Pendidikan ini merupakan salah satu idu pembangunan nasional yang harus diperhatikan selain ketimpangan pendapatan dan kesehatan. Karena ini

akan menjadi investasi jangka panjang bagi suatu negara, dimana akan terciptanya generasi yang memiliki sumber daya manusia yang semakin baik untuk memajukan suatu negara.

Ketimpangan pendapatan juga dapat terjadi jika tingkat pengangguran di suatu wilayah tinggi. Masalah pengangguran merupakan masalah salah satu masalah yang masih sangat krusial hingga saat ini. Pengangguran terjadi akibat lapangan pekerjaan yang lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Bukan hanya itu, penyebab lainnya adalah banyaknya pencari kerja yang tidak memiliki skill dan juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lowongan pekerjaan yang hendak dilamarnya. Akibat rendahnya skill dan pengetahuan sehingga mendorong bertambahnya angka pengangguran.

Dengan tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pendapatan atau upah sehingga terjadi pelebaran kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Berikut grafik yang menunjukkan data pengangguran dikabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 – 2021 :

**Gambar 1.4**  
**Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2017 – 2021**



Sumber : BPS Sumut (data diolah)

Berdasarkan gambar grafik diatas, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berada di Kota Medan, Kabupaten deli serdang dan Kabupaten langkat. Dimana Kota Medan sebanyak 10.74% pada tahun 2020. Kemudian Kabupaten Deli Serdang ada sebanyak 9.13% di tahun 2021 dan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten langkat ada sebanyak 7.02% pada tahun 2020. Ketiga kabupaten inilah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi dan untuk kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terendah adalah pakpak barat yaitu sebanyak 0.19% di tahun 2019. Hal tentu akan berhubungan dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut, dimana di kota medan memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sementara untuk Kabupaten Pakpak Barat memang memiliki jumlah penduduk yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jika jumlah penduduk di suatu daerah itu tinggi tentu akan mempengaruhi jumlah penduduk yang akan diterima bekerja di daerah tersebut, karena dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia di suatu daerah yang terbatas maka tentunya jumlah orang yang menganggur juga akan tinggi. Apabila jumlah pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan mempengaruhi tingkat ketimpangan di daerah tersebut juga. Dimana akan terjadi kesenjangan antara penduduk yang kaya dan yang miskin di daerah tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yoertiara & Feriyanto, 2022) memperoleh hasil dimana tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan 6 Provinsi di Pulau Jawa

dalam periode 2012 – 2021. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suryani & Woyanti, 2021) dimana pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010 – 2018.

Ketimpangan pendapatan jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan permasalahan baru. Masalah yang akan muncul seperti keparahan tingkat kemiskinan, penanganan dan perbaikan yang akan semakin sulit, kesenjangan sosial dan juga banyaknya gejolak sosial yang akan timbul.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara mengalami fluktuasi tahun 2017 – 2021.
2. Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara mengalami kenaikan begitu juga dengan ketimpangan pendapatan tetap meningkat juga tahun 2017 – 2021.
3. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara mengalami fluktuasi tahun 2017 – 2021.
4. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara mengalami fluktuasi tahun 2017 – 2021.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan masalah dalam penelitian ini menjadi :

1. Objek penelitian adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2021.
2. Penelitian ini terbatas hanya membahas faktor – faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan seperti fluktuasi Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran pada tahun 2017 – 2021.

### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara tahun 2017 – 2021 ?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara tahun 2017 – 2021 ?
3. Apakah Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara tahun 2017 – 2021 ?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi , IPM, dan Tingkat Pengangguran secara bersama – sama berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara tahun 2017 – 2021 ?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara tahun 2017 – 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara tahun 2017 – 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara tahun 2017 – 2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara tahun 2017 – 2021.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, manfaat yang diinginkan yaitu dapat memberikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan, pemikiran, informasi, dan kepada pihak lain yang berkepentingan khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi pada bidang ekonomi pembangunan. Serta dijadikan acuan dan rujukan bagi penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Sumatera Utara.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti berkaitan tentang teori Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan, penelitian ini mampu dijadikan sebagai pertimbangan dan sumbangan wawasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi angka ketimpangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut sehingga berdampak pada IPM daerah yang tinggi hingga dapat mengurangi angka pengangguran di Sumatera Utara juga.